

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam upaya menciptakan stabilitas dalam kehidupan negara, pemerintahan orde baru menjalankan strategi melalui program pembangunan nasional. Pada masa itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) turut serta terlibat dalam proses pembangunan nasional. Keterlibatan ABRI pada pembangunan nasional bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).¹ Dengan adanya keterlibatan ABRI, diharapkan program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan terarah, sehingga mampu memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan dan stabilitas negara. Melalui sinergi antara pemerintah dan ABRI, diharapkan terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat fondasi keamanan dan kedaulatan negara.

ABRI memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejak dulu, ABRI dikenal dengan kesatuan dan persatuan bersama rakyat. Pasukan ABRI berasal dari yang memiliki tekad kuat untuk bangkit dan berjuang demi menghilangkan penjajah yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Hal ini menjadi landasan utama perjuangan ABRI dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kepercayaan yang tinggi dari rakyat terhadap ABRI telah menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab yang

¹ Soebijono, S. H. (1990). *Dwifungsi ABRI: perkembangan dan peranannya dalam kehidupan politik di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada, hlm. 135.

bertujuan untuk mengembangkan kehidupan yang demokratis dan konstitusional. Dengan semangat inilah, ABRI terus berkomitmen untuk melindungi dan melayani rakyat, serta menjaga kedaulatan negara demi tercapainya kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.² Peran ABRI selalu identik dengan kehidupan rakyat serta dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu ABRI akan terus bersinergi bersama rakyat.

Jendral M. Jusuf, yang pada saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditunjuk oleh Presiden Soeharto, meluncurkan program ABRI Masuk Desa (AMD). Program tersebut didesain untuk memfokuskan upaya pembangunan pada masyarakat pedesaan. Alasan pemilihan desa sebagai sasaran utama dari pembangunan nasional adalah karena desa merupakan tempat tinggal bagi mayoritas penduduk Indonesia. Oleh karena itu, desa dianggap sebagai basis pertahanan rakyat dalam hal bela negara. Melalui program AMD, diharapkan bahwa kesejahteraan masyarakat pedesaan dapat meningkat, sehingga mampu berkontribusi dalam pertahanan dan keamanan negara. Dengan pendekatan ini, diharapkan bahwa kekuatan pertahanan nasional dapat semakin mengakar di tengah-tengah masyarakat, sehingga terwujudnya ketahanan nasional yang kokoh. Selain itu, program AMD juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan sehingga dapat turut merasakan manfaat dari pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan.³

² Indonesia. Angkatan Darat. Dinas Penerangan. (1988). *Sewindu TNI-ABRI masuk desa, 1980-1988*. [Jakarta] : Dispenad, hlm. 06.

³ Djoened, M., & Notosusanto, N. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 600.

Desa mempunyai potensi kekayaan alam serta sumber daya manusia yang melimpah, yang dapat dimanfaatkan sebagai pasokan pangan dan ketenagakerjaan dalam pembangunan nasional. Konsep kemandirian ABRI bersama rakyat dapat membantu keberhasilan program AMD dalam mencapai daerah pedesaan di Indonesia. Kemandirian merupakan ciri khas dan jati diri ABRI, serta menjadi pilar utama keberhasilan ABRI dalam menumbuhkan nilai persatuan nasional. Dengan memanfaatkan potensi desa secara optimal, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan turut mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi pedesaan dan memperkuat ketahanan pangan serta ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, kemandirian ABRI bersama rakyat menjadi salah satu fondasi utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional, ABRI telah diberikan tugas yang tidak hanya terbatas pada tugas kemiliteran. Hal ini sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 23 Februari 1970. Presiden Soeharto berharap ABRI dapat aktif terlibat dalam upaya pembinaan masyarakat guna membantu pelaksanaan pembangunan nasional serta memodernisasi masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, ABRI diharapkan dapat mengandalkan sistem organisasi yang baik, jiwa pengabdian pada negara, keteguhan dalam kepemimpinan, serta pengalaman yang dimiliki. Dengan demikian, ABRI diharapkan dapat menjadi mitra yang handal dalam mendukung pembangunan nasional serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa

dan negara.⁴ Berdasarkan amanat tersebut, Jendral M. Jusuf sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan mengusulkan program ABRI Masuk Desa sebagai upaya untuk membangun pedesaan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa, yang menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional. Dengan pengembangan ini, diharapkan masyarakat desa dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan mereka. Melalui program ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara perkembangan wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga kesenjangan pembangunan dapat teratasi. Selain itu, kehadiran ABRI di desa juga diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan ketertiban masyarakat, serta memberikan kontribusi positif dalam memperkuat pertahanan negara dari tingkat terendah. Dengan demikian, program ABRI Masuk Desa diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya membangun keamanan dan kesejahteraan di tingkat lokal.

Program AMD bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ABRI, yang sebelumnya mengalami erosi akibat dwifungsi ABRI dalam pemerintah. Dengan adanya program ini, diharapkan hubungan antara ABRI dan masyarakat dapat dipulihkan, serta citra ABRI di mata masyarakat dapat ditingkatkan. Hal ini diharapkan akan memperkuat peran ABRI sebagai organisasi yang memiliki akar dalam ikatan sosial negara. Dengan demikian, ABRI diharapkan dapat kembali menjadi institusi yang dihormati dan dipercayai oleh masyarakat, serta dapat berperan secara efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Dengan adanya program AMD, diharapkan ABRI dapat kembali

⁴ *Ibid*, hlm. 135.

menjadi kekuatan yang mendapat dukungan penuh dari masyarakat, sehingga dapat menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam memelihara keamanan dan kedaulatan negara.

Kegiatan AMD merupakan upaya yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan desa-desa di seluruh wilayah Indonesia. Melalui program ini, diharapkan desa-desa dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk menjadi sumber daya penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan ketenagakerjaan dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Selain itu, program AMD juga mempunyai target untuk menanamkan nilai-nilai bela negara kepada masyarakat desa, sehingga mampu menjadi bagian yang aktif dalam pembangunan bangsa. Selain itu, program ini juga menjadi alat untuk melawan ideologi asing yang dianggap dapat mengancam ideologi Pancasila. Pidato yang disampaikan oleh Mayor Jendral TNI Edi Sudrajat pada pembukaan AMD XVII menjadi bukti komitmen dalam menentang upaya perubahan ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi lain yang dapat mengganggu kesatuan dan keutuhan bangsa. Dengan demikian, program AMD diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam memajukan desa-desa dan memperkuat kesatuan bangsa Indonesia.

Penelitian ini memiliki daya tarik yang signifikan karena masih sedikitnya literatur yang tersedia mengenai sejarah Program AMD. Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai Dwifungsi ABRI, namun program tersebut masih belum banyak terekspos dalam literatur. Penelitian seputar keterlibatan militer, khususnya ABRI, dalam politik Indonesia dan permasalahan negara yang melibatkan ABRI telah banyak dilakukan. Selain tugas utamanya dalam menjaga

keamanan dan ketertiban negara, ABRI juga memiliki peran dalam pengaturan negara. Citra buruk Dwifungsi ABRI dalam masyarakat perlu digali dari sudut pandang lain, terutama dalam pelaksanaan Program AMD. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman lebih lanjut terkait peran serta dampak Program AMD dalam konteks sejarah Dwifungsi ABRI.

Program ini merupakan sebuah wujud nyata dari konsep pembangunan nasional yang mencakup berbagai aspek penting dalam memajukan bangsa. Dari segi ekonomi, program ini memberikan dorongan yang signifikan melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor sosial. Selain itu, keberadaan program ini juga memberikan perhatian yang serius terhadap aspek keagamaan, yang merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun masyarakat yang berkualitas. Keberadaan program AMD juga menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan yang terstruktur, dengan contoh nyata seperti program TMMD yang dilaksanakan oleh TNI. Namun demikian, perlu dicermati kemungkinan adanya agenda tersirat dari pemerintah Orde Baru untuk memperkuat dominasinya melalui program ini. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi kemajuan bangsa dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik semata.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran penulis atas minimnya kajian mengenai program ABRI Masuk Desa dalam konteks sejarah Orde Baru. Kebaharuan dalam penelitian skripsi ini yaitu menjelaskan secara detail tentang

peran ABRI dalam pembangunan desa di Jawa Barat. Orde Baru merupakan salah satu periode yang telah banyak diteliti oleh para sejarawan dan akademisi. Pemilihan rentang tahun 1980-1998 sebagai fokus penelitian didasari oleh pentingnya periode tersebut dalam implementasi Program ABRI Masuk Desa (AMD) hingga akhir dari era Orde Baru. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengangkat topik "Peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dalam Pembangunan Desa di Jawa Barat 1980-1998" dengan dukungan literatur, narasumber sejarah, serta dokumen dan arsip sejarah. Selain itu, kemudahan akses terhadap sumber-sumber baik primer maupun sekunder juga menjadi pertimbangan dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di latar belakang, maka penulis mempunyai batasan masalah yaitu Bagaimana Peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dalam Pembangunan Desa di Jawa Barat 1980-1998?

Untuk memfokuskan permasalahan yang akan diteliti agar jelas dan terarah maka penulis memaparkan dalam beberapa pokok permasalahan yang akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia?
2. Bagaimana peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam menjalankan Pembangunan Desa di Jawa Barat 1980-1998?
3. Bagaimana dampak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terhadap Pembangunan Desa di Jawa Barat 1980-1998?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
2. Untuk memperoleh data tentang Peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dalam Pembangunan Desa di Jawa Barat 1980-1998;
3. Untuk mendapatkan data tentang dampak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terhadap Pembangunan Desa di Jawa Barat 1980-1998.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait khususnya prajurit TNI umumnya untuk warga negara Indonesia agar dapat bermanfaat secara teoritis, praktis dan empiris. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bahan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan, penelaahan kajian sejarah, serta memberikan informasi tentang “Peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dalam Pembangunan Desa di Jawa Barat 1980-1998”.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dan memberikan pengetahuan tentang “Peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Dalam *Pembangunan Desa di Jawa Barat 1980-1998*". Penelitian ini juga penulis harap dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.3 Kegunaan Empiris

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan empiris kepada pembaca dalam menganalisis tentang "Peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dalam Pembangunan Desa di Jawa Barat 1980-1998".

1.5 Tinjauan Teoritis

1.5.1 Kajian Teoritis

1.5.1.1 Teori Hubungan Sipil dan Militer

Teori hubungan sipil dan militer membahas peran militer dalam lingkungan masyarakat, yang sering disebut sebagai "Kontrol Sipil". Kontrol sipil terbagi menjadi dua jenis, yaitu kontrol sipil subjektif dan kontrol sipil objektif. Kontrol sipil subjektif terjadi ketika kekuatan sipil dimaksimalkan sepenuhnya sehingga keberadaan militer hanya berada pada tingkat minimal atau bahkan tidak berarti sama sekali. Hal ini disebabkan oleh banyaknya aktor sipil yang saling memengaruhi satu sama lain, sehingga pemaksimalan kekuatan sipil hanya terjadi pada aktor sipil tertentu. Dalam konteks ini, kontrol sipil subjektif mengacu pada dominasi penuh kekuatan sipil atas militer. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang kedua jenis kontrol sipil ini sangat penting dalam memahami dinamika hubungan antara sipil dan militer dalam suatu masyarakat.⁵

⁵ Huntington, S. P. (2003). *Prajurit dan negara: Teori dan politik hubungan militer-sipil / Samuel P. Huntington; Penerjemah: Deasy Sinaga*. Jakarta: Grasindo, hlm. 10

Ketiga istilah kontrol sipil subjektif yang disebutkan, yaitu kontrol sipil oleh lembaga pemerintah, kontrol sipil oleh kelas sosial, dan kontrol sipil oleh bentuk konstitusional, merupakan konsep penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di suatu negara. Kontrol sipil oleh lembaga pemerintah mengacu pada penggunaan institusi pemerintah sebagai alat untuk mengendalikan kekuatan militer, seperti yang terjadi dalam pemerintahan monarki absolut di masa lalu. Sementara kontrol sipil oleh kelas sosial mencerminkan pengaruh dan kekuatan ekonomi dari kelompok aristokrat dan borjuis liberal dalam memegang kendali atas kebijakan militer dan keamanan. Di sisi lain, kontrol sipil oleh bentuk konstitusional menekankan pentingnya hukum dan sistem pemerintahan yang mengatur hubungan antara kekuasaan sipil dan militer, seperti yang terjadi dalam sistem demokrasi modern.

Dengan adanya ketiga bentuk kontrol sipil ini, diharapkan tercipta keseimbangan yang sehat antara kepentingan sipil dan militer dalam menjaga stabilitas serta keadilan di suatu negara. Penggunaan mekanisme kontrol sipil yang tepat dapat meminimalisir potensi terjadinya kudeta atau penggunaan kekuatan militer secara sewenang-wenang, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan demokrasi dan kebebasan sipil. Namun demikian, implementasi dari ketiga bentuk kontrol sipil ini juga memerlukan kesadaran dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, kelompok sosial, maupun masyarakat umum, dalam menjaga prinsip-prinsip kontrol sipil demi kepentingan bersama.

Seiring dengan dinamika perkembangan politik dan sosial di berbagai negara, pemahaman dan implementasi mengenai kontrol sipil subjektif juga perlu terus disesuaikan dengan konteks lokal dan global. Hal ini mencakup penyesuaian terhadap perubahan dalam struktur kekuasaan politik, dinamika perubahan sosial, serta tantangan-tantangan keamanan yang semakin kompleks. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai kontrol sipil subjektif dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga stabilitas dan keadilan di tengah-tengah perubahan zaman.⁶ adalah bentuk Terdapat tiga bentuk kontrol sipil subjektif, yaitu kontrol sipil oleh lembaga pemerintah, kontrol sipil oleh kelas sosial, dan kontrol sipil oleh bentuk konstitusional. Kontrol sipil oleh lembaga pemerintah adalah bentuk kontrol yang dilakukan melalui maksimalisasi peran institusi pemerintah, seperti yang terjadi dalam pemerintahan monarki absolut. Kontrol sipil oleh kelas sosial merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh kelompok sosial tertentu, seperti kelompok aristokrat dan borjuis liberal, yang memiliki pengaruh dan kekuatan ekonomi untuk memegang kendali. Sementara kontrol sipil oleh bentuk konstitusional adalah bentuk kontrol yang dilakukan melalui hukum atau sistem pemerintahan yang mengatur pembentukan hukum, contohnya adalah keberadaan konstitusi dalam sistem demokrasi. Dengan adanya ketiga bentuk kontrol sipil ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara kekuasaan sipil dan militer demi menjaga stabilitas dan keadilan dalam suatu negara.

Prinsip kontrol sipil terhadap kekuatan militer yang bertujuan untuk memastikan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dicapai

⁶ *Ibid.*, hlm 11.

melalui distribusi kuasa antara pemerintah sipil dan militer, sehingga menciptakan kemandirian dan profesionalisme di dalam tubuh militer. Dalam konteks ini, terdapat dua tingkatan yang perlu diperhatikan, yaitu tingkatan kuasa dan tingkatan ideologi. Kuasa dapat bersifat formal maupun informal, dimana otoritas formal mencakup hierarki dalam struktur pemerintahan, sedangkan pengaruh informal melibatkan afiliasi, sumber daya manusia, interpretasi hierarkis, serta prestise dan popularitas di kalangan militer. Dengan memahami dan memperhatikan kedua tingkatan ini, kontrol sipil dapat dijalankan secara efektif untuk memastikan profesionalisme militer dan mencegah terjadinya militerisasi yang berpotensi merugikan bagi negara.

Hubungan antara sipil dan militer sangat dipengaruhi oleh tingkat ideologis yang dianut oleh suatu negara. Ideologi yang mayoritas dianut akan berdampak pada etika dan perilaku militer dalam suatu negara. Sebagai contoh, ideologi liberalisme cenderung menolak penggunaan senjata dan pembentukan pasukan militer yang besar, sementara ideologi fasisme mendorong kepemilikan angkatan bersenjata yang kuat. Di sisi lain, ideologi marxisme lebih menitikberatkan pada kuasa ekonomi daripada kebutuhan akan militer. Sedangkan ideologi konservatisme memiliki kesamaan dengan etika militer yang telah ada. Dalam konteks ini, ideologi yang dianut oleh suatu negara akan sangat memengaruhi kebijakan dan tindakan militer yang diambil. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara ideologi dan militer sangatlah penting dalam konteks keamanan dan pertahanan suatu negara.

Dinamika antara sipil dan militer pada akhirnya akan menciptakan pola-pola tertentu yang dipengaruhi oleh kuasa, profesionalisme, dan ideologi. Dalam konteks ini, terdapat lima pola potensial yang mungkin muncul. Pertama, adalah pola di mana terdapat ideologi anti militer namun kekuatan politik militer sangat tinggi dengan rendahnya profesionalisme militer. Kedua, adalah pola di mana terdapat ideologi anti militer namun kekuatan politik militer rendah dan profesionalisme militer juga rendah. Ketiga, adalah pola di mana terdapat ideologi anti militer namun kekuatan politik militer rendah namun dengan profesionalisme militer yang tinggi. Keempat, adalah pola di mana terdapat ideologi pro militer dengan kekuatan politik militer yang tinggi dan profesionalisme militer yang tinggi. Kelima, adalah pola di mana terdapat ideologi pro militer namun kekuatan politik militer rendah namun dengan profesionalisme militer yang tinggi. Implikasi dari dinamika ini dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas dan keseimbangan kekuasaan dalam suatu negara, serta memperlihatkan kompleksitas hubungan antara sipil dan militer.⁷

1.5.1.2 Teori Perubahan Sosial dan Pembangunan

Perubahan sosial banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis. Menurut para beberapa ahli, teori perubahan terjadi dikarenakan berbagai faktor dan didukung oleh teori lain. Lebih dari empat dekade, bidang studi pembangunan dan perubahan sosial telah didominasi oleh tiga aliran pemikiran, yakni teori modernisasi, teori dependensi dan teori sistem dunia. Seperti yang dikemukakan dalam buku menjabarkan pada akhirnya ketiga aliran pemikiran

⁷ *Ibid.*, hlm 13

tersebut sama-sama berujung pembangunan dan pengertiannya berdasarkan faktor yang mempengaruhinya.⁸ Pembangunan adalah salah satu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan dengan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.⁹

Teori Perubahan sosial merupakan konsep yang menggambarkan segala bentuk perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan suatu masyarakat. Perubahan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem sosial yang ada. Fokus utama dari teori ini adalah pada lembaga masyarakat, yang merupakan himpunan kelompok manusia yang memiliki struktur dan pola interaksi yang kompleks. Perubahan dalam lembaga masyarakat ini dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial, seperti norma, nilai, dan struktur sosial lainnya. Dengan demikian, teori perubahan sosial memperhatikan bagaimana perubahan dalam satu lembaga masyarakat dapat mempengaruhi lembaga masyarakat lainnya secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan keterkaitan antara berbagai elemen dalam suatu masyarakat, serta pentingnya memahami dampak perubahan sosial terhadap sistem sosial secara menyeluruh.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, perubahan sosial merupakan suatu proses yang terjadi dalam berbagai lembaga sosial di masyarakat dan berdampak pada perilaku, sikap, serta nilai-nilai yang ada dalam lingkungan tersebut. Perubahan

⁸ Suwarsono; So, Alvin Y. (1994). *Perubahan sosial dan pembangunan / Suwarsono, Alvin Y.SO*. Jakarta : Pustaka LP3ES, hlm. 3.

⁹ Siagian, S. P. (1983). *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya*. Gunung agung, hlm, 9.

¹⁰ Marius, J. A. (2006). Perubahan sosial. *Jurnal Penyuluhan*, 2(2), hlm. 2.

tersebut meliputi lingkungan hidup secara keseluruhan, termasuk nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku, struktur organisasi lembaga-lembaga, lapisan masyarakat, relasi sosial, serta sistem komunikasi. Selain itu, perubahan sosial juga berkaitan dengan aspek kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, serta kemajuan teknologi. Dengan demikian, perubahan sosial tidak hanya terjadi dalam satu aspek saja, melainkan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai perubahan sosial sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan masyarakat dalam menghadapi dinamika perubahan yang terus berlangsung.

1.5.1.3 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan-keputusan yang dibuat. Dalam proses lahirnya, kebijakan publik dilandasi atas keputusan politis untuk mengimplementasikan program dalam mencapai tujuan demi kepentingan masyarakat.¹¹ Berdasarkan keputusan yang dibuat harus didasari dari tuntutan masyarakat demi mencapai kepentingan Bersama. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yang dimaksud oleh penulis adalah suatu Tindakan yang dibuat sehingga membuat suatu keputusan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Pembuatan kebijakan pun harus ikut serta dalam proses perumusan kebijakan yang dibuat. Pemerintah sebagai eksekutif yang bertugas sebagai penyelenggara kebijakan negara yang mengakomodir dan menjalankan

¹¹ Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis. *Yogyakarta Gava Media*, hlm. 40.

sistem harus dapat menampung tuntutan dari permasalahan yang ada agar kebijakan tersebut tepat sasaran.

Penulis mengambil konsep kebijakan publik dalam tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan pada masa orde baru dalam menjaga kestabilan dalam kehidupan bernegara.

1.5.2 Kajian Pustaka

Kajian pustaka salah satu bagian penting dalam penulisan ilmiah, termasuk kedalam penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam kajian pustaka, penulis membandingkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dijalankan. Dengan demikian, kajian pustaka dapat memperkuat analisis yang dilakukan dengan mengaitkan konsep-konsep yang telah ada dengan penelitian yang sedang berlangsung. Selain itu, melalui kajian pustaka ini, penulis juga mencari sumber bacaan yang dapat menjadi data penelitian untuk mendukung kajian yang sedang dilakukan. Dengan demikian, kajian pustaka tidak hanya menjadi landasan teori, tetapi juga menjadi pijakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik penelitian. Dengan demikian, kajian pustaka menjadi langkah awal yang penting dalam meniti jalan menuju hasil penelitian yang berkualitas tentang Peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dalam Pembangunan Desa di Jawa Barat 1980-1998.

Rujukan pertama dan kedua adalah buku yang diterbitkan oleh Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad) (1988) berjudul "*sewindu TNI-ABRI Masuk Desa 1980-1988*" dan "*Dwi windu TNI-ABRI Masuk Desa 1988-1996*" tahun terbit 1997 dan kedua buku tersebut diterbitkan di Jakarta. Buku ini secara

umum membahas mengenai laporan kegiatan dan data-data tentang AMD dari tahun 1980-1988 sedangkan buku selanjutnya membahas dari tahun 1988-1996. Pada awal bagian buku ini juga menjelaskan tentang cikal bakal pemikiran hingga sampai terbentuknya program AMD yang akan membantu penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian. Didalam buku tersebut juga telah dijelaskan bahwa program AMD merupakan implementasi pengabdian ABRI pada masyarakat dan negara di luar dari bidang kemiliteran. Selain latar belakang juga di kedua buku tersebut berisi tentang laporan-laporan selama program tersebut dilaksanakan.

Sumber primer yang pertama yaitu arsip ABRI tentang “Sasaran Program Terpadu Dan Kegiatan “Manunggal TNI-ABRI Masuk Desa Tahun 1986-1987” arsip ini berisi mengenai data-data program terpadu yang dilakukan ABRI serta sasaran kegiatan ABRI dalam Operasi Bhakti tahun 1986-1987. Sumber primer yang kedua adalah arsip dari Departemen Pertahanan-Keamanan Penanggung Jawab Operasional TNI-ABRI Masuk Desa dengan Judul “Guntingan Berita dan Suara Pers Manunggal-XI” arsip ini berisi tentang berita-berita yang dikeluarkan selama berlangsungnya kegiatan ABRI masuk desa.

1.5.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil Penelitian Relevan merupakan acuan untuk penulisan Proposal Penelitian, penulis diharuskan untuk memasukkan artikel jurnal dan Skripsi yang relevan dengan topik penelitian sebagai referensi. Oleh sebab itu dipaparkan mengenai penelitian terdahulu dalam bentuk artikel jurnal dan skripsi.

Hasil penelitian yang relevan pertama yaitu Artikel jurnal yang berjudul “Perkembangan ABRI Masuk Desa (AMD) Tahun 1980-1998” yang disusun oleh

Isnu Novia Setiowati dan Sumarno (2015) dari program studi Pendidikan Sejarah. Universitas Negeri Surabaya. Artikel ini berisi tentang perkembangan program ABRI Masuk Desa yang didalamnya condong tentang daerah-daerah di Jawa Timur sebagai tempat penelitiannya. Perbedaan dengan penelitian nanti yang akan dilakukan penulis yaitu tentang isinya dikarenakan artikel ini tentang perkembangan ABRI Masuk Desa akan tetapi penulis akan meneliti tentang operasi bhakti yang dilakukan ABRI, bukan tentang ABRI masuk desanya saja.

Penelitian yang relevan selanjutnya yaitu skripsi yang berjudul “Peran ABRI Sebagai Kekuatan Politik Pada Masa Orde Baru 1966-1997” yang ditulis oleh F. D. Istyaningrum pada tahun 2004 dari Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Skripsi ini meneliti tentang peran ABRI yang menjadi salah satu kekuatan politik pada masa Orde Baru. Berbeda dengan apa yang ditulis penulis bahas akan tetapi ada konteks yang hampir sama dalam keterlibatan ABRI dalam bidang sosial. Namun yang membedakan adalah peneliti lebih fokus terhadap Program ABRI masuk desa serta operasi bhakti yang dilakukan oleh ABRI didalam berisi mengenai peran militer dalam membangun pembangunan nasional khususnya di bidang sosial.

Skripsi ini menjadi rujukan dikarenakan beberapa alasan. Salah satunya periode waktu 1966-1997 yang kebetulan memiliki kurun waktu yang bersamaan dengan penelitian penulis yakni 1980-1998. Kemudian pembahasan yang ada didalamnya juga membahas Orba dan militer. Yang dapat disimpulkan bahwa skripsi ini memiliki pembahasan yang bersinggungan. Pembedanya adalah dari segi pembahasan yang penulis kaji akan fokus pada Program AMD sebagai salah satu

bukti nyata keterlibatan ABRI dalam membangun pembangunan nasional serta membuat citra ABRI baik terhadap rakyat.

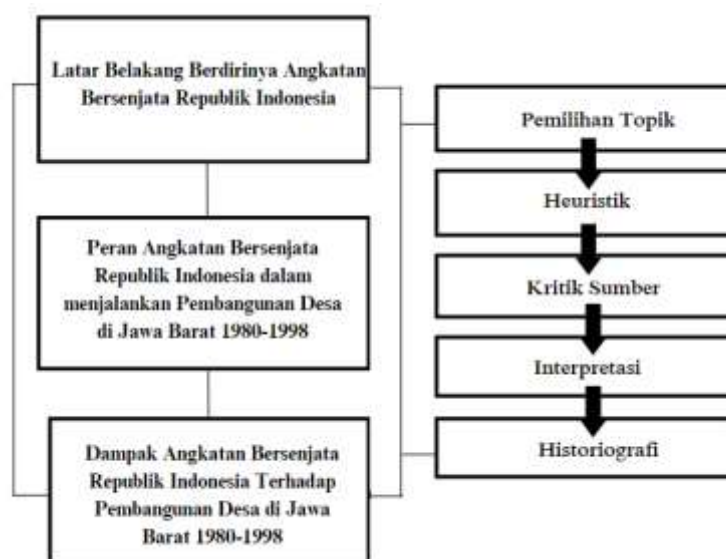
Penelitian yang relevan terakhir skripsi yang berjudul “Militer dan Kekuatan Politik: Studi Tentang Keterlibatan TNI Dalam Perpolitikan Nasional Era 1945-1998” yang ditulis oleh H. N. Kamil tahun 2009 beliau merupakan mahasiswa Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini meneliti Tentang keterlibatan militer terhadap politik nasional pada era 1945-1998 bahwa pada era itu terjadi dua pemerintahan yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Perbedaan skripsi kamil dengan peneliti yang sedang dikaji oleh penulis ialah terletak pada fokus pembahasan yakni penulis lebih tertuju pada keterlibatan militer dalam bidang sosial dan pembangunan sedangkan skripsi Kamil fokus pada masalah perpolitikan yang dilakukan oleh militer.

1.5.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu landasan teoritis untuk menghubungkan antara konsep-konsep yang terkait dalam sebuah penelitian. Dalam penyusunannya, kerangka konseptual membantu menentukan pertanyaan penelitian yang relevan dan juga prosedur empiris yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dengan demikian, kerangka konseptual menjadi panduan yang memandu peneliti dalam menyusun langkah-langkah penelitian secara sistematis. Melalui kerangka konseptual, peneliti dapat memahami keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti, serta memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena yang sedang dipelajari. Dengan demikian, kerangka konseptual menjadi

sebuah komponen penting dalam perumusan dan pelaksanaan suatu penelitian, karena mampu memberikan arah dan fokus yang jelas dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan pertanyaan penelitian, serta merancang langkah-langkah penelitian yang tepat dan relevan.¹²

Penelitian ini mengkaji mengenai Peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dalam Pembangunan Desa di Jawa Barat 1980-1998. Penelitian ini dimulai dari kajian Sejarah ABRI kemudian membahas peran ABRI dalam Pembangunan Desa di Jawa Barat dan terakhir membahas dampak ABRI dalam Pembangunan Desa di Jawa Barat 1980-1998.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

1.6 Metode Penelitian Sejarah

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah metode sejarah, sesuai dengan pendapat Kuntowijoyo. Metode sejarah ini terdiri dari beberapa tahapan,

¹² Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hlm. 60.

pertama adalah pemilihan topik yang akan diteliti. Selanjutnya, tahap heuristik dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Setelah itu, dilakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan, baik kritik sumber intern maupun kritik sumber ekstern guna memastikan validitas dan akurasi informasi. Tahap berikutnya adalah interpretasi, di mana penulis akan menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang telah diperoleh dari sumber-sumber tersebut. Terakhir, hasil dari keseluruhan proses ini akan disusun dalam bentuk histografi, yang merupakan narasi sejarah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, metode sejarah ini akan memberikan landasan yang kuat untuk menyusun sebuah kajian sejarah yang komprehensif dan akurat.¹³

1.6.1 Pemilihan Topik

Tahap pertama penelitian sejarah, langkah yang sangat penting adalah pemilihan topik. Penulis harus memastikan bahwa topik yang dipilih memiliki relevansi yang kuat dengan bidang sejarah. Selain itu, topik yang dipilih juga harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti memiliki daya tarik untuk diteliti lebih lanjut serta memiliki arti penting dan manfaat yang jelas bagi pengetahuan dan kegunaan lainnya. Dengan pemilihan topik yang tepat, peneliti akan dapat menghasilkan penelitian sejarah yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu sejarah. Oleh karena itu, pemilihan topik

¹³ Kuntowijoyo, D. R. (2005). *Pengantar ilmu sejarah*. Bentang Pustaka, hlm. 69.

merupakan langkah awal yang harus dilakukan dengan cermat dan teliti dalam rangka mencapai kesuksesan dalam penelitian sejarah.¹⁴

Batas waktu yang ditentukan penulis untuk penelitian ini adalah tahun 1980-1998. Mengapa penulis mengambil tahun tersebut dimana pada tahun 1980 awal mula ABRI melakukan Operasi Bhakti atau yang sekarang dikenal sebagai TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa). Selanjutnya, batas ruang yang diambil penulis adalah Peran ABRI dalam Operasi Bhakti di Indonesia, mengapa peneliti mengambil topik tersebut karena masih banyak orang yang belum tahu mengenai operasi non hankam ini maka peneliti tertarik untuk membahas topik ini.

1.6.2 Heuristik

Tahap selanjutnya dalam metode penelitian sejarah yaitu *heuristik*. Didalam tahap ini merupakan kegiatan penulis untuk mengumpulkan sumber-sumber, data dan informasi mengenai tema atau topik yang akan dikaji dimana sumber yang digunakan bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian. Penulis menyusun proposal penelitian yang berjudul Peran ABRI Dalam Operasi Bhakti di Indonesia 1980-1998 ini dimulai dari mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan tema penelitian penulis. Sumber-sumber tersebut penulis dapatkan dari buku koleksi dari perpustakaan TNI-AD dan buku koleksi pribadi. Untuk memanfaatkan media internet penulis mencari sumber yang relevan melalui Google Cendikia dan Ipusnas.

¹⁴ Dyah Kumalasari, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011), hlm. 1.

Sumber sejarah dapat dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan sifatnya. Pertama, sumber primer, yang merupakan catatan atau dokumentasi langsung dari orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami peristiwa tersebut. Sumber ini dapat berupa dokumen, arsip, surat kabar, dan bahkan informasi lisan atau audio-visual yang dibuat pada saat peristiwa terjadi. Kedua, sumber sekunder, yang diperoleh dari kesaksian orang yang bukan saksi langsung atau dari orang yang mendengar peristiwa dari pihak lain. Sumber ini bisa berupa buku atau hasil penelitian. Dengan memahami perbedaan antara sumber primer dan sumber sekunder, kita dapat menggali informasi sejarah dengan lebih akurat dan mendalam. Penting untuk mempertimbangkan keandalan dan konteks dari setiap sumber sejarah untuk memahami peristiwa sejarah secara komprehensif.¹⁵

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber primer dan sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal sebagai penunjang dalam penelitian ini. Kemudian untuk metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan pada pencarian data dan informasi melalui dokumen, arsip, buku, catatan, foto, maupun data elektronik yang dapat mendukung proses penelitian sejarah. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan berbagai sumber informasi yang relevan dan terpercaya untuk mendukung analisis dan temuan dalam penelitian. Selain itu, studi pustaka juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap topik yang diteliti serta melacak perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, metode studi

¹⁵ Kuntowijoyo, *Op.Cit.*, hlm. 5.

pustaka merupakan pendekatan yang efektif dalam mengumpulkan data untuk penelitian sejarah dan memberikan landasan yang kuat bagi kesimpulan yang dapat dipercaya.

Sumber primer yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Arsip yang dikeluarkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Penanggung Jawab Operasional TNI-ABRI Masuk Desa yang berjudul “Sasaran Program Terpadu dan Kegiatan Manunggal TNI-ABRI Masuk Desa Tahun 1986-1987”;
2. Arsip yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan Penanggung Jawab Operasional TNI-ABRI Masuk Desa yang berjudul “Guntingan Berita dan Suara Pers Manunggal-XI”;
3. Koran yang diterbitkan oleh Pikiran Rakyat pada 18 November 1984 tentang “TNI/ABRI Masuk Desa Manunggal XVII di Kabupaten Kuningan”;
4. Koran yang diterbitkan oleh Bandung Pos pada 23 November 1984 tentang “AMD Manunggal XVII di Pandeglang”;
5. Buku yang diterbitkan oleh Dinas Penerangan Angkatan Darat yang berjudul “Sewindu TNI-ABRI Masuk Desa 1980-1988”;
6. Buku yang diterbitkan oleh Dinas Penerangan Angkatan Darat yang berjudul “Dwi windu TNI-ABRI Masuk Desa 1988-1996”;
7. Arsip-arsip TNI-AD tentang Operasi Bhakti.

Sumber Sekunder yang akan penulis pakai untuk menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang dibuat oleh Ricco Jefryargo yang berjudul “ABRI Masuk Desa (AMD) Wilayah Kodam III Siliwangi: Program Pembangunan Desa Masa Orde Baru (1980-1998) terbitkan di Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
2. Artikel yang dibuat oleh Isnu Novia yang berjudul “Perkembangan ABRI Masuk Desa (AMD) 1980-1998” diterbitkan di ejournal.unesa.ac.id pada 1 Maret 2015.

1.6.3 Kritik Sumber

Tahap verifikasi atau kritik sumber suatu tahap yang penting dalam penelitian sejarah guna memastikan keaslian dan keandalan sumber yang digunakan. Proses ini dilakukan setelah tahap pengumpulan sumber (heuristik) guna memastikan bahwa sumber-sumber yang telah diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Kritik sumber dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal melibatkan penelusuran terhadap konteks historis, asal-usul, dan keandalan sumber dari luar, sedangkan kritik internal berkaitan dengan analisis isi dan kekonsistenan sumber itu sendiri. Dengan melakukan tahap verifikasi ini, diharapkan peneliti dapat memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejarah memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga dapat mendukung validitas temuan dan kesimpulan yang dihasilkan.¹⁶

Tahap pertama dalam kritik eksternal adalah menilai keaslian sumber sejarah yang digunakan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan apakah sumber

¹⁶ Kuntowijoyo, *Op.Cit.*, hlm. 5.

yang digunakan merupakan sumber asli atau hanya turunan dari sumber lain. Hal ini sangat penting terutama ketika menggunakan sumber primer dalam penelitian sejarah. Kritik eksternal melibatkan pemeriksaan secara fisik terhadap sumber, seperti bahan kertas, tinta, warna, dan bentuk dokumen. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan buku sebagai sumber primer yang diperoleh dari Perpustakaan TNI-AD. Dengan melakukan kritik eksternal, diharapkan bahwa keaslian dan keandalan sumber tersebut dapat dipastikan sehingga hasil penelitian yang dihasilkan dapat diandalkan dan akurat.

Setelah selesai melakukan kritik eksternal, langkah selanjutnya adalah melakukan kritik internal. Tahap ini sangat penting karena berkaitan dengan keabsahan sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian. Kritik internal dilakukan dengan memeriksa kredibilitas sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah sumber yang digunakan dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Salah satu metode yang digunakan dalam tahap ini adalah dengan membandingkan satu sumber sejarah dengan sumber sejarah lain yang telah diverifikasi pada tahap kritik eksternal. Dengan demikian, peneliti dapat menentukan apakah sumber tersebut relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks penelitian yang sedang diangkat. Hasil perbandingan antara sumber sejarah yang telah diverifikasi menunjukkan bahwa sumber yang digunakan dalam penelitian ini relevan dan dapat diandalkan.

1.6.4 Interpretasi

Dalam tahap keempat, yaitu interpretasi, penulis melakukan analisis terhadap sumber-sumber sejarah yang telah diverifikasi. Hal ini dilakukan untuk menetapkan

hubungan yang saling keterkaitan antara sumber-sumber sejarah tersebut guna melihat hubungan fakta yang terdapat di dalamnya. Tahap interpretasi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu tahap analisis dan tahap sintesis. Pada tahap ini, penulis menggunakan metode analisis untuk menggali informasi yang terdapat dalam sumber-sumber sejarah yang telah diverifikasi. Dengan demikian, tahap interpretasi ini menjadi sangat penting dalam proses penulisan sejarah, karena melalui analisis tersebut penulis dapat memahami secara mendalam tentang fakta-fakta sejarah yang terdapat dalam sumber-sumber yang telah di verifikasi untuk memperoleh data tentang Peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Pembangunan Desa di Jawa Barat Tahun 1980-1998.

1.6.5 Historiografi

Pada bagian historiografi merupakan tahap proses penulisan sejarah yang berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di berbagai sumber yang telah melewati semua tahap. Dalam penulisan historiografi harus disusun secara objektif dan sistematis.¹⁷ Pada tahap ini penulis akan menguraikan tentang awal terbentuknya ABRI dan setelah itu penulis akan menjelaskan tentang peran ABRI dalam pembangunan desa hingga mengerucut kepada apa yang dicapai oleh ABRI dalam pembangunan desa tersebut. Kemudian pada tahapan simpulan penulisan akan memaparkan hasil dari hasil penelitian berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan oleh penulis melalui sumber yang didapatkan.

¹⁷ Kuntowijoyo, *Op.Cit.*, hlm. 78-79.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul “Peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dalam Pembangunan Desa di Jawa Barat Tahun 1980-1998” terdiri dari beberapa bagian bab, dengan sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian serta tinjauan teoritis, metode penelitian sejarah dan sistematika pembahasan; BAB II menjelaskan tentang hasil penelitian atau pembahasan tentang Latar Belakang berdirinya ABRI, sejarah terbentuk AMD serta Cikal bakal AMD; BAB III menjelaskan tentang hasil penelitian atau pembahasan tentang peran ABRI dalam pembangunan desa di Jawa Barat tahun 1980-1998; BAB IV membahas tentang apa yang dampak yang diciptakan oleh ABRI selama menjalankan Pembangunan Desa di Jawa Barat Tahun 1980-1998 serta rintangan apa yang ABRI hadapi ketika menjalankan Operasi Bhakti; BAB V simpulan dan saran yang memuat kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang dibuat secara uraian padat dan saran yang isinya masukan dari penulis yang ditujukan kepada para pembaca dan peneliti untuk menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.